



Pengembangan Pariwisata Laut Mati Pantai Tureloto Di Kabupaten Nias Utara

Nancy Melisa Onibala¹⁾, Santri Marfirah Zai²⁾, Khaidir Ali³⁾

Universitas Negeri Manado, Sulawesi, Indonesia^{1, 2)}
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia³⁾

nancyonibala@unima.ac.id¹⁾
santrimarfirahzai@gmail.com²⁾
khaidirali@umsu.ac.id³⁾

Abstrak

Pengembangan pariwisata mulai menjadi salah satu program unggulan dalam pembangunan daerah. Peran pemerintah dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi dan lainnya. Di Indonesia juga ternyata ditemukan laut mati yang berada di Kabupaten Nias Utara, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan pariwisata laut mati di Pantai Tureloto. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata Pantai Tureloto meliputi sektor infrastruktur dan kebersihan lingkungan. Walaupun demikian, aksesibilitasnya belum memenuhi standar pembangunan yang seperti diharapkan. Dalam hal ini, perlunya melakukan kerjasama dengan masyarakat agar kebersihan lingkungan tetap terjaga seperti menyediakan tong sampah dan adanya petugas kebersihan. Pemerintah perlu melakukan peninjauan lebih terhadap objek wisata ini, dilihat dari hasil observasi di lakukan pada Pantai Tureloto, ini sangat berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki keindahan dan keunikan alam yang menakjubkan.

Kata Kunci : Pengembangan Pariwisata, Peran Pemerintah, Pariwisata Laut Mati

Abstract

Tourism development is starting to become one of the leading programs in regional development. The government's role in developing and managing tourism in general is to provide infrastructure (not only in physical form), expand various forms of facilities, coordinate activities and others. In Indonesia, it turns out that the Dead Sea was found in North Nias Regency. This research aims to determine the development of Dead Sea tourism on Tureloto Beach. The method used in this research uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of this research show that the Government's role in developing the Tureloto Beach tourist destination includes the infrastructure and environmental cleanliness sectors. However, accessibility has not yet met development standards as expected. In this case, it is necessary to collaborate with the community to maintain environmental cleanliness, such as providing rubbish bins and cleaning staff. The government needs to carry out further review of this tourist attraction, judging from the results of observations made at Tureloto Beach, this has great potential to be developed because it has amazing natural beauty and uniqueness.

Keywords: Tourism Development, Government Role, Dead Sea Tourism



PENDAHULUAN

Industri pariwisata saat ini menjadi salah satu industri yang mempunyai peran cukup penting dalam pembangunan nasional negara. Di tahun 2017, secara global industri pariwisata telah mengubah kehidupan jutaan orang melalui mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangiberbaga kemiskinan, dan mempercepat pembangunan serta penguatan toleransi (Crotti & Misrahi, 2017). Kondisi yang sama juga terjadi di Indonesia di mana sektor pariwisata pada tahun 2016 menunjukkan perkembangan dan kontribusi yang terus meningkat dan semakin signifikan terhadap Product Domestic Brutto (PDB) nasional sebesar 4,03% atau senilai Rp. 500,19 triliun, dengan peningkatan devisa yang dihasilkan mencapai Rp. 176-184 triliun dan tenaga kerja pariwisata sebanyak 12 juta orang (Kementrian Pariwisata, 2016).

Melihat pada potensi tersebut, pengembangan pariwisata mulai menjadi salah satu program unggulan dalam pembangunan daerah. Pembangunan pariwisata yang direncanakan dan dikelola secara berkelanjutan dengan berbasis pada masyarakat akan mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan lapangan kerja. Di samping itu, pembangunan pariwisata juga dapat menciptakan pendapatan yang dapat digunakan untuk melindungi dan melestarikan budaya dan lingkungan dan secara langsung menyentuh masyarakat setempat. Pengembangan pariwisata merupakan salah satu program yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata dalam meningkatkan kunjungan dan pendapatan dalam segi ekonomi dan lainnya.

Salah satu keistimewaan di dunia adalah terdapatnya suatu peristiwa Laut Mati atau Dead Sea berada di antara dua negara, yakni Israel dan Yordania. Perairan ini disebut hipersalin karena kandungan garamnya cukup tinggi, bahkan dinilai sebagai salah satu danau paling asin (salt lake) di dunia. Alasan kenapa perairan ini disebut Laut Mati karena tidak ditemukannya kehidupan di lokasi tersebut, berkat kandungan garamnya yang cukup tinggi. Ikan dan ganggang pun disebut tidak bisa hidup di lokasi ini. Adapun airnya terlihat berwarna biru, dengan kristal-kristal garam yang menonjol dari dalam air. Tak hanya kaya akan kandungan garamnya, laut mati juga punya lumpur yang mengandung mineral yang tinggi. Selain di Yordani dan Israel, di Indonesia juga ternyata ditemukan "Laut Mati", di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara yang sering disebut dengan Pantai Tureloto. Seperti versi Yordania, laut mati ala pantai Tureloto hadir dengan kandungan garam hingga 33,7% atau Sembilan kali lebih banyak dari kandungan garam di laut pada umumnya yang berkisar 3,5%. Kadar garam yang tinggi membuat air lautnya terasa lebih padat. Sesuai dengan teorinya, ketika massa jenis benda lebih kecil dari pada massa jenis airnya, maka benda tersebut akan mengapung.

Pantai Tureloto lebih tepatnya terletak di Desa Balefadorotuhu, Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Pantai ini berjarak sekitar 60 km dari kota Gunungsitoli atau 80 km dari Bandara Bhinaka. Dengan keindahan dan keunikan alam yang ada di pantai Tureloto banyak para wisatawan datang untuk berwisata kesana, baik wisatawan local hingga wisatawan dari luar negeri. Namun, ada beberapa permasalahan yang selama ini sangat disayangkan dikarekan masih kurangnya sarana dan prasarana, sehingga akses ke pantai tersebut cukup jauh dan susah untuk dilalui oleh para wisatawan. Hal tersebutlah yang membuat pantai ini masih tertinggal dan tidak bias bersaing dengan wisata lainnya. Tentunya, peran pemerintah harus menjadi pemegang peran utama dalam memajukan wisata laut mati ini, karena hanya terdapat beberapa di seluruh dunia. Seharusnya ini bisa menjadi salah satu ikon yang menjadi ciri khas daerah dalam memperkenalkan beberapa SDA yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas sangat berbeda sekali dengan UU nomor 10 tahun 2009 (selanjutnya disingkat UU kepariwisataan) pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintahdaerah. Dimana di pantai Tureloto kurang adanya dukungan sesuai dengan UU nomor 10 tahun 2009 pasal 1 ayat (3). Maka, pentingnya fasilitas yang mendukung pengembangan pariwisata dalam memajukan



dan mensejahterakan daerah wisata. Apalagi dengan keunikan yang tidak didapatkan pada daerah lain. Untuk itu, penelitian ini berusaha menggambarkan kondisi terhadap pengembangan pariwisata di Pantai Tureloto, Kabupaten Nias.

Tinjauan Pustaka

Pariwisata adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan untuk tujuan hiburan dan pariwisata. Menurut Prayogo (2018) Pariwisata secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perjalanan seseorang atau sekelompok orang dari satu tempat ke tempat lain membuat rencana dalam jangka waktu tertentu, untuk tujuan rekreasi dan mendapatkan hiburan sehingga keinginannya terpenuhi. Berbagai pengertian pariwisata sangat banyak dijelaskan oleh para ahli-ahli pariwisata, seperti organisasi pariwisata dunia (World Tourism Organization) yang mengemukakan definisi pariwisata sebagai berikut: "The activities of persons travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purpose," (WTO, 1999:1)

Maksud dari definisi pariwisata menurut WTO, adalah pariwisata sebagai kegiatan orang atau sekelompok orang yang bepergian dengan melakukan perjalanan dan menempati sebuah tempat diluar lingkungan biasanya mereka tinggal dengan batas waktu tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk liburan, bisnis, dan 14 tujuan lainnya. Pariwisata adalah suatu jenis perjalanan yang direncanakan dan dilakukan dari satu tempat ke tempat lain secara individu atau kelompok, dengan tujuan memperoleh beberapa bentuk kepuasan dan kesenangan. (Sinaga, 2010).

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata dalam pasal 1 ayat 3, pariwisata adalah segala jenis aktivitas wisata dan didukung dengan segala fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, maupun pemerintah daerah. Selain itu, pariwisata merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepariwisataan, termasuk pengembangan obyek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan bidang pariwisata. Segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata yang dimaksud adalah objek dan daya tarik wisata (Marsono dkk, 2016).

Dari beberapa pengertian Pariwisata yang dipaparkan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pariwisata merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan dengan tujuan rekreasi, melepas penat, mencari hiburan dan suasana baru yang dilakukan di suatu tempat tertentu sesuai keinginan, yakni diluar lingkungan daerah biasanya namun hanya sementara waktu saja. Dalam kegiatan wisata tersebut secara langsung tentunya telah disediakan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat memenuhi kebutuhan dalam berwisata.

Pemahaman mengenai pariwisata sebagai suatu sistem tersebut menunjukkan bahwa terdapat banyak aktor yang terlibat serta memiliki peran dalam menggerakkan sistem pariwisata. Aktor-aktor tersebut, baik individu maupun kelompok, disebut pula sebagai insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor yang terkait dengan pariwisata. Secara umum, insan-insan pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu: (1) masyarakat, (2) swasta, dan (3) pemerintah. Pilar masyarakat merujuk pada masyarakat umum yang ada pada destinasi atau lokasi wisata, sebagai pemilik sah dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata seperti kebudayaan. Termasuk didalamnya tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan media massa. Pilar selanjutnya adalah pilar swasta yaitu asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata. Pilar terakhir adalah pemerintah yang memiliki wewenang pada berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah pusat, negara bagian, provinsi, kabupaten, dan seterusnya (Pitana & Gayatri, 2005).

Mengacu pada pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata sepatutnya melibatkan ketiga pilar tersebut. Pengembangan pariwisata tidak hanya mengandalkan kemampuan bisnis dari pihak swasta. Tanpa adanya dukungan dari pemerintah maupun masyarakat, maka pengembangan bisnis pariwisata yang dijalankan oleh pihak swasta tidak dapat berjalan lancar. Begitupula pengembangan pariwisata yang hanya dikelola oleh



pemerintah, tanpa melibatkan pilar lainnya. Pemerintah akan mengalami kesulitan dalam peningkatan investasi dan modal dalam pengembangan pariwisata tersebut. Namun, hal yang paling penting adalah keterlibatan dari pilar masyarakat yang selama ini sering kali diabaikan dalam pengembangan pariwisata. Akibatnya masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah atau destinasi wisata sering kali tidak ikut merasakan manfaat dari pengembangan pariwisata di sekitar mereka. Jikapun terlibat maka peran yang mereka jalankan sangat minimal sehingga tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat local. Pada beberapa kasus, masyarakat local di sekitar destinasi wisata hanya menjadi penonton sementara pada saat yang sama mereka terkena berbagai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang negative akibat dari pengembangan wisata di daerah mereka (Anuar & Sood, 2017).

METODE

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana permasalahan yang diangkat tidak terungkap melalui data-data statistik tetapi data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata tertulis, lisan atau gambar daripada angka-angka tentang masalah yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sugiyono (2016) mengemukakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran/lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai objek yang diteliti dan berusaha melihat fenomena yang terjadi dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya khususnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pantai Tureloto lebih tepatnya terletak di Desa Balefadorotuhu, Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Focus penelitian yang di terapkan dalam penelitian ini mengenai peran pemerintah dalam pengelolaan potens pariwisata.

Peran pemerintah dalam mengembangkan dan mengelolah pariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparat pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke daerah lain maupun ke luar negeri. Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi stakeholder yang lain di dalam memainkan peran masing-masing. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 UU Nomor 10 Tahun 2009 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pariwisata merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan setiap daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Pariwisata merupakan suatu objek yang sangat berpotensi dalam meningkatkan kemajuan suatu daerah, seperti halnya pada sektor ekonomi, budaya, dan kearifan lokal pada masyarakat, pengelolaan sumber daya yang baik dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah, sehingga pemerintah sangat berperan dalam pengembangan atau pengelolaan wisata. Menurut Ruhanen (2013:92) dalam penelitian (Sentanu & Mahandiasar 2020) mengatakan bahwa pemerintah daerah mampu meningkatkan perkembangan pada sektor pariwisata kedepannya untuk mencapai tujuan dari pemerintah pusat.

Hambatan Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Pantai Tureloto

Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pengelolaan yang memadai dapat membuat suatu daerah sejahtera karena adanya kerja sama dan saling membantu antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah, sehingga tidak ada tempat wisata yang terbengkalai dan akses menuju tempat wisata pun bisa dilalui oleh wisatawan. Namun, dalam melakukan proses pengembangan destinasi wisata Pemerintah Kabupaten Nias Utara masih mengalami kendala dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagai salah satu yang berperan penting dalam pengembangan destinasi wisata. Seperti pada proses yang dilakukan oleh pemerintah pada sektor pengembangan yang paling berpengaruh yaitu anggaran dana pemeliharaan dan pengembangan destinasi wisata.

Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Infrastruktur, dan Lingkungan

Infrastruktur merupakan faktor yang penting dalam pariwisata, karena menyangkut pengembangan wisata seperti, hotel, jalan, jembatan, pelabuhan, alat-alat transportasi, bandara dan lainnya yang masih kurang pada daerah. Kabupaten Nias Utara masih sangat ketinggalan akses atau transportasi dan juga kondisi jalanan yang terjal, tinggi dan berbatu sehingga cukup mempersulit para wisatawan yang ingin berkunjung ke Pantai Tureloto. Pada tahun 2017 silam Bupati Nias Utara Marselinus Ingati Nazara sempat mengatakan bahwa di Pantai Tureloto untuk tahap awal, Pemerintah Kabupaten Nias Utara akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,5 milyar untuk pengembangan dan penataan lokasi di Pantai Tureloto, namun hingga saat ini belum ada kemajuan yang berarti.

Demikian karena tidak adanya pemeliharaan yang serius terhadap destinasi wisata ini, maka destinasi wisata ini sulit mengalami kemajuan. Akses menuju tempat wisata ini tidak mudah dilalui karena belum adanya perbaikan jalan menuju pantai tersebut, beberapa pondok yang berada di lokasi wisata itu pun sudah sangat memprihatinkan karena kurang adanya tanggungjawab dari berbagai pihak.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengembangan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Objek Wisata Pemerintah Kabupaten Nias Utara di Pantai Tureloto

Pemerintah mengalami beberapa hambatan dalam pengembangan destinasi wisata. Pendanaan adalah anggaran operasional yang digunakan dalam pembangunan suatu objek wisata, dalam penelitian Robby (2021) mengatakan bahwa anggaran merupakan suatu pencapaian pemikiran dalam pekerjaan yang hendak dicapai pada periode tertentu dalam bentuk ukuran berupa financial. Tahap penganggaran sangat penting untuk menjamin keefektifan membangun suatu tempat dalam meningkatkan kemajuan suatu daerah, selain itu anggaran juga dapat tidak efektif berorientasi dan dapat menggagalkan suatu kinerja dalam perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah.

Dari keterangan yang didapatkan peneliti bahwa Kabupaten Nias Utara setiap tahunnya mempunyai anggaran dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Nias Utara, pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Nias Utara mempunyai program kerja pada sektor Pariwisata dan kebudayaan

Hambatan Pemerintah Daerah dalam proses pengembangan dan pemeliharaan wisata yang ada di Pantai Tureloto adalah terkendala terhadap anggaran dalam bidang pengembangan



infrastruktur maupun lingkungan. Menurut Sutisna (2006:9) pada penelitian (Lestari & Firdausi, 2017) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan mempunyai empat indikator meliputi ekonomi kesejahteraan, lingkungan berkelanjutan, keadilan sosial, lingkungan hidup yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur secara sederhana yang dapat dipakai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menilai kesuksesan seorang pemimpin dalam pelaksanaan pembangunan.

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan potensi daya tarik wisatawan adalah dengan cara memaksimalkan kegiatan sebagai peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata (Sawir & Pende, 2020). Menurut salah satu narasumber Sri Nurhalizah menyatakan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Desa dan para kelompok sadar wisata untuk mengembang objek wisata. Sehingga kemajuan untuk sektor pariwisata Pantai Tureloto sulit tercapai.

Kesimpulan

Peran Pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata Pantai Tureloto meliputi sektor infrastruktur dan kebersihan lingkungan. Terdapatnya aksesibilitas yang belum memenuhi standar pembangunan. Dalam hal ini, peran pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan masyarakat agar kebersihan lingkungan tetap terjaga seperti menyediakan tong sampah dan adanya petugas kebersihan. Pemerintah perlu melakukan peninjauan lebih terhadap objek wisata ini, karena Pantai Tureloto ini sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi wisata yang dapat dikenal didunia karena memiliki keindahan dan keunikan alam yang menakjubkan serta tidak tidak didapatkan di daerah lain di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anuar, A.N.A. & Sood, N.A.A. (2017). Community Based Tourism: Understanding, Benefits and Challenges. *Journal Of Tourism and Hospitality*, 6 (1).
- Amirudin, A. (2017). Inovasi Peran Pemerintah Desa Dalam Kebijakan Pariwisata di Kota Batu. *Journal Of Public Sector Innovations*, 2(1), 26-32.
- Mukhsin, Dadan. (2014). Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Galunggung. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 14(1), 1-11.
- Pitana, I G., Gayatri, PG. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Prayogo, Rangga Restu. (2018). *Perkembangan Pariwisata Dalam Perspektif Pemasaran*. PT Lontar Digital Asia: Bitread Publishing.
- Marsono, dkk. (2016). *Dampak Pariwisata Religi Kawasan Masjid Sunan Kudus Terhadap Ekonomi, Lingkungan dan Sosial Budaya*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Musfira, Dia & Safrida. (2022) Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Simeuleu. *Journal Of Public Administration and Local Governance*, 6(1), 25-34.
- Rusyidi, B. & Fedryansyah, M. (2018) Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Pekerjaan Sosial*. 1(3), 155-165.
- Sawir, M. & H, Pende. (2020) Peran Pemerintah Desa Lalos Dalam Mengembangkan Obyek Wisata Pantai Batu Bangga. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*. 2(1), 43-48.
- Sinaga & Supriono. 2010. *Potensi Dan Pengembangan Objek Wisata*. Medan: Kartas Karya.

Undang-Undang

Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Dalam Perlindungan Dan Pelestarian Objek Wisata.